

BAB II

PRESPEKTIF TEORITIS

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardle sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat mengartikan: pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.¹

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah : kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat

¹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), h. 3

lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.²

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan – atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia – adalah : upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.³

Faktor faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Rojek menekankan sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk didalamnya adalah sistem ekonomi dan politik. Webb, mendukung pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena hubungan antara individu dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu, menjadi sangat penting untuk

² Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung : Alfabeta, 2007) h. 01

³ Nani Machendrawaty dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994) h. 42

memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi dimana mereka hidup.⁴

Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah

⁴ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), h. 14

⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005), h. 60

pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.⁶

Human capital theory, menekankan : bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.⁷

3. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.⁸

⁶ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 03

⁷ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 04

⁸ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 03

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:⁹

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

⁹Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta : Gramedia, 1999), h. 56

- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu konsep utama dalam ilmu kesejahteraan sosial pada era 1990-an hingga saat ini. Sering kali dikaitkan dengan intervensi komunitas. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mendapatkan penekanan yang lebih khusus. Terutama pada model intervensi pengembangan masyarakat. Sebagai suatu konsep

pemberdayaan masyarakat mempunyai berbagai definisi. Salah satunya adalah Paine sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹⁰ Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Dengan demikian maka kesejahteraan sosial akan muncul sebagai akibat pemberdayaan. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Menurut Midgley sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.¹¹

Dalam kaitan dengan definisi diatas, midgley menekankan bahwa kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: pertama, tingkatan dimana suatu masalah dapat dikelola; kedua, sejauh mana

¹⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas&Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h.206

¹¹Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas&Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h.35

kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi; dan terakhir, tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah.

B. Pemberdayaan Ekonomi

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*oikos*” dan ”*nomos*”. Artinya ‘tata kelola rumah tangga’. Tata-kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah ‘ekonomi’ merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup rumah tangga.¹²

Pemberdayaan sosial-ekonomi ialah: usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi.

Pemberdayaan sosial-ekonomi ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja..¹³

¹²Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta : Haji Masagung, 1990), h. 82

¹³Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 245

Perekonomian adalah merupakan modal dasar pembangunan, untuk itu pembangunan dipedesaan adalah merupakan satu strategi pembangunan yang dirangsang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya *home industry* tersebut diharapkan membawa perubahan terhadap kondisi perekonomian masyarakat Mojokantren, dengan demikian upaya yang dilakukan oleh masyarakat *home industry* tersebut adalah peningkatan kreatifitas dalam kegiatan perekonomian yang ada dimasyarakat melalui pemberian ketrampilan usaha dagang, pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, pemasaran hasil usaha, dan bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik yang ada dimasyarakat.

Menurut Pudjiwati Sajogyo dalam penelitiannya tentang peranan wanita dalam perkembangan masyarakat desa mengungkapkan bahwa wanita juga memberikan sumbangan besar dalam ekonomi masyarakat dan rumah tangga maupun dalam kehidupan dirumah.¹⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan : bahwa upaya pengembangan dan pemberdayaan difokuskan pada dorongan yang pada akhirnya akan terjadi perubahan struktural dan dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam konsisten perekonomian, yang tentunya mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengawasaan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penguasaan kelembagaan serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.¹⁵

¹⁴Tapi Omas Ihromi, *Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1990), h. 153

¹⁵Sudarman Darim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h. 56

C. Pembangunan Desa dan Pengembangan Masyarakat

Upaya pengembangan masyarakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan politis dan pemerintahan di Indonesia sendiri. Pola pengembangan masyarakat di Indonesia secara umum dikembangkan oleh kementerian dalam negeri. Sedangkan secara sektoral dikembangkan oleh beberapa departemen dan lembaga pemerintah nondepartemental, serta lembaga-lembaga nonpemerintah. Di Indonesia, pola pengembangan masyarakat dealam kerangka kementerian dalam negeri, dimasukkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pengembangan masyarakat di Indonesia lebih ditekankan pada desa, antara lain karena lebih dari 2/3 penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan (baik itu *rural village* maupun *urban village*). Disamping itu, bila dilihat dari sisi sejarah, terlihat perbedaan pandangan dalam melihat desa antara Indonesia dengan beberapa Negara maju. Bila pada beberapa Negara maju, desa hanya merupakan garis belakang (*hinterland*) yang memberi dukungan pada kota, di indonesia sejak ratusan tahun yang lalu desa menjadi titik sentral kehidupan Negara. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan-perjuangan yang selalu didukung oleh daerah pedesaan ataupun berbasiskan di suatu pedesaan. Di sektor ekonomi, wilayah pedesaan di Indonesia juga menjadi sumber kehidupan karena Indonesia adalah Negara agraris. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia akan kurang mempunyai arti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa. Pemilihan pemangunan masyarakat desa sebagai titik sentral pengembangan msyarakat di Indonesia

juga dilakukan, karena disadari masih cukup banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal.

Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat desa, pada dasarnya, serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development* atau CD). Menurut Schlippe sebagaimana dikutip Isbandi Rukminto Adi pada mulanya teori tentang pembangunan masyarakat desa ini tidak ada. Perkembangan teori pembangunan desa itu dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi di dalam negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat.¹⁶

Secara teoretis, agar suatu desa berkembang dengan baik, maka terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu: (1) desa (dalam bentuk wadah) (2) masyarakat desa dan (3) pemerintahan desa. Masyarakat desa, adalah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal pada unit pemerintahan terendah langsung dibawah camat. Sementara itu, pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah kepala desa.¹⁷

¹⁶Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas&Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h.202

¹⁷Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas&Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h. 202

D. Sustainability

Istilah “sustainability” adalah terjemahan dari “keberlanjutan”. Sustainability atau keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kata keberlanjutan adalah berasal dari bahasa latin *sustinere* (sus,naik; tenere,untuk bertahan)¹⁸

Sustainability (keberlanjutan) adalah kemampuan untuk bertahan dalam menjalankan usaha dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tingkat kemandirian masyarakat terus meningkat kualitasnya. Seperti dalam unsur pemberdayaan terdapat unsur *self-help* yaitu upaya untuk membantu dirinya sendiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Paul sebagaimana yang dikutip oleh Harry Hikmat mengemukakan bahwa sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin yaitu melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.¹⁹ Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi).

Sehubungan dengan itu, dalam pemberdayaan terdapat pendekatan pemandirian (*self help*). Pendekatan ini mengasumsikan masyarakat sebagai

¹⁸<http://www.ml.scribd.com>, *Arsitektur Berkelanjutan Berbasis Pengelolaan SDA*, oleh Nazaruddin Khuluk diakses pada 3 Mei 2011

¹⁹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung:Humaniora,2010), h.04

unit mekanik dan kohesif, yang di dalamnya tercampurkan individu yang memiliki kemampuan dengan yang tidak memiliki kemampuan.²⁰ Perubahan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari komunitas melalui konsolidasi struktur dan kesadaran-kesadaran kritis.

Pendekatan ini mempercayai bahwa orang-orang mempunyai hak dan kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan/memenuhi kebutuhan secara kolektif. Artinya potensi kolektivitas dalam pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhan selalu terdapat dalam masyarakat.

Kualitas hidup manusia bisa dilihat dari pemenuhan akan kebutuhan setiap harinya, dengan berbagai bentuk dalam menjaga keseimbangan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi, dengan demikian bentuk pemberdayaan yang stabil adalah berupa kegiatan yang bisa menguatkan dan membantu mengembangkan dirinya.

Dengan konsep tersebut, Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Sutisna N, mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok ukur itu meliputi :

²⁰http://darmawansalman.blogspot.com/kerangka_community_development, diakses pada 19 Mei 2014

1. Pro lingkungan hidup-dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya. Berbagai pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan. Terkait dengan tolak ukur pro lingkungan ini, Syahputra mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

- a. menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi.
- b. Pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestariannya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya takterbarukan (*non renewable resources*).
- c. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.
- d. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan.

2. Pro rakyat miskin - dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *HumanDevelopment Index* (HDI) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Yang dimaksud indikator ini adalah bukan berarti anti orang kaya, melainkan memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian

khusus karena tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak mempunyai modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah.

3. Pro kesetaraan jender - dimaksudkan untuk lebih banyak membuka kesempatan pada kaum perempuan untuk terlibat dalam arus utama pembangunan.
4. Pro penciptaan lapangan kerja - dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), index gini, pendapatan perkapita, dan lain-lain. Indikator Kesejahteraan Masyarakat juga dapat menjadi salah satu hal dalam melihat dan menilai tolok ukur ini.
5. Pro dengan bentuk NKRI adalah suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.
6. Harus anti korupsi, kolusi serta nepotisme.²¹

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki arti bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional dan spiritual.

Di negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini, sebagian besar rakyatnya bergelut disektor kecil dan mikro menurut data Badan Pusat

²¹<http://penataanruang.net>, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*, diakses pada 19 Mei 2014

Statistik (BPS,2002) jumlah usaha kecil dan menengah termasuk usaha mikro dan UKM mencapai angka 41 juta unit atau 99,99% dari total usaha yang ada dan menyerap 99,4 % dari total angkatan kerja yang ada.²²

UKM memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 63,56% terhadap produk domestik bruto (PDB) di luar minyak dan gas. Namun demikian, peranan UKM dalam ekspor masih relative rendah yaitu dibawah 20%. Selanjutnya kalau data UKM tersebut di pilah lebih rinci lagi, bahwa dari 41 juta unit tersebut, sebanyak 39,95 juta atau 99,85% adalah usaha kecil dan 55 ribu atau 0,14% usaha menengah. Dari 39,95juta usaha kecil tersebut , 97,4% merupakan usaha mikro yang omsetnya di bawah 50 juta pertahun. Ini artinya, sebanyak 175 juta orang (83%) dari sekitar 210 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan diri pada usaha mikro. Hal itu juga berarti 95,5% tenaga kerja di Indonesia berada di sektor mikro.²³

Sektor kecil dan mikro itulah sejatinya yang selama ini banyak menopang perekonomian nasional Indonesia. Ketahanan akan terhadap krisis sudah terbukti, karena mereka memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Usaha mikro dan kecil memiliki efisiensi yang tinggi. Misalnya, ketika memulai usaha mereka tidak harus mengeluarkan biaya untuk mengurus perijinan. Mereka memang belum pantas membayar perijinan. Sektor ini juga sangat jarang mengiklankan usahanya. Mereka biasanya beriklan lewat cara dari mulut ke mulut.

²²<http://www.tamzis.com>, *Yang tetap eksis disaat krisis, oleh Anwar T* diakses pada 19 Mei 2014

²³<http://www.tamzis.com>, *Yang tetap eksis disaat krisis, oleh Anwar T* diakses pada 19 Mei 2014

2. Usaha mikro dan kecil memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Jadi mereka bisa dengan mudah menyesuaikan dengan kondisi usaha mereka.
3. Usaha mikro dan kecil memiliki spectrum yang luas dari sisi jenis usaha serta pihak yang bisa ikut berperan. Usaha mikro bisa dilakukan oleh berbagai kalangan. Mulai dari orang yang tidak tamat SD hingga sarjana.
4. Usaha mikro dan kecil adalah pelaku ekonomi yang mandiri. Sektor kecil dan mikro menggunakan modal sendiri atau dari keluarga.
5. Ketergantungan terhadap pihak asing rendah. Modal, kerja, manajemen serta berbagai aspek sektor kecil dan mikro tidak banyak ditentukan oleh pihak asing. Pengrajin bisa memilih komoditas yang akan diproduksi. Untuk membuat produk hanya sebagian kecil yang menggunakan produk import.

Di dalam mewujudkan sustainabilitas maka dibutuhkan strategi untuk bisa mencapai ketahanan ekonomi, baik didalam memenuhi kesejahteraan rakyat maupun dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Strategi pembangunan diarahkan untuk :

- a. Memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi, sehingga akan terjadi perubahan struktur ekonomi yang semakin seimbang dan saling menunjang.

- b. Memanfaatkan sumber-sumber domestik : sehingga sumber domestik menjadi komponen yang semakin berperan dalam perekonomian nasional.
- c. Memperkuat pasar domestik sehingga pasar domestik menjadi penentu pertumbuhan ekonomi.
- d. Memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, menjadi sektor ekonomi yang berperan terhadap penciptaan lapangan kerja, penciptaan penghasilan baru, penciptaan inovasi-inovasi baru, dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
- e. Memperkuat pembentukan *human capital*, sehingga tercipta *knowledge based society*.²⁴

Dengan mengembangkan UKM, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mampu menumbuhkan perekonomian di negeri ini. Dengan begitu, kita mampu memberdayakan sumber daya manusia dengan baik. UKM yang berkembang pesat akan menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga tenaga kerja yang terserap pun meningkat dan tingkat pengangguran dapat ditekan.

E. Peran Sustainability UKM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan paling bersih Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan

²⁴<http://fearlessmey.wordpress.com>, *Pengembangan UKM dalam Menciptakan Ketahanan Ekonomi di Indonesia*, oleh YS Riza diakses pada 28 Mei 2014

merupakan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah : “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

Ditilik dari segi pemberdayaan masyarakat peran Usaha Kecil dan Menengah tidak perlu diragukan lagi. Sejarah telah menunjukkan bahwa UKM di Indonesia menjadi katup penyelamat krisis ekonomi tahun 1997 karena kemampuannya memberikan sumbangan yang besar dalam membasmi hantaman PHK dan sempitnya lapangan pekerjaan.

Menurut Sikhondze eksistensi UKM kala itu telah berubah menjadi solusi “dunia kerja baru” yang fleksibel bagi semua lapisan masyarakat, secara tidak langsung disinilah terjadi proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan UKM berorientasi ke masyarakat dimana membantu dalam mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, menetapkannya secara partisipatoris, dan pendekatannya lebih terspesialisasi pada kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok.²⁵

²⁵[http://www.scribd.com/doc/Ukm Dan Pemberdayaan Masyarakat](http://www.scribd.com/doc/Ukm_Dan_Pemberdayaan_Masyarakat), oleh Andistya Oktaning Listra di akses pada 28 Mei 2014

F. Keunggulan dan kelemahan sustainabilitas UKM dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Keunggulan sustainabilitas UKM menurut Partomo dan Rachman²⁶, antara lain:

- a. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
- c. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis
- d. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

2. Kelemahan sustainabilitas UKM menurut Tambunan antara lain:

- a. Kesulitan pemasaran

Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

²⁶ <http://yusuffadillah.wordpress.com/2011/04/14/Usaha-Kecil-Menengah/>, oleh Yusuf Fadilah diakses pada 28 Mei 2014

b. Keterbatasan finansial

UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia.

Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami

kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

e. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global.²⁷

Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

²⁷ <http://yusuffadillah.wordpress.com/2011/04/14/Usaha-Kecil-Menengah>, oleh Yusuf Fadilah diakses pada 28 Mei 2014